

Hedi Pudjo Santosa:

Orang Tua Tergoda Kebanggaan Semu

Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 memunculkan fenomena baru: banyak orang tua mendadak mengaku miskin. Mereka mengantongi surat keterangan tidak mampu (SKTM) agar sang anak diterima di sekolah yang dituju. Setelah verifikasi, sedikitnya 78.406 lembar dari 148.854 SKTM gugur. Mengapa orang tua memberikan ajaran tidak jujur di depan sang anak? Berikut perbincangan dengan wartawan Suara Merdeka Agus Toto Widyatmoko dengan dosen FISIP Undip Hedi Pudjo Santosa.

Banyak orang tua mengaku jadi warga miskin yang dibuktikan dengan SKTM untuk meloloskan anak diterima di sekolah yang diinginkan. Gejala apa?

Gejala di masyarakat kita ini sangat menarik diamati secara sosiologis. Artinya orang yang merasa miskin itu seolah-olah menjadi tiket untuk meraih jenjang pendidikan lebih baik untuk masuk ke sekolah favorit. Namun sebetulnya awal kemunculan hal itu adalah keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak ke sekolah yang memiliki nilai tertentu. Apakah itu disebut favorit, berprestasi tinggi, seperti kalau tidak diterima di sekolah itu menjadi aib. Padahal, pendidikan tidak melulu di sekolah favorit. Kalau di perguruan tinggi, begitu tidak diterima di PTN masih banyak PTS yang berprestasi tidak jelek. Namun tampaknya dengan SKTM itu mereka ingin memperoleh sesuatu. Kira-kira begini yang diinginkan, kita rela dikatakan mis-

kin asal diterima di sekolah yang dituju.

Dengan pemalsuan data SKTM itu, apakah bisa dikatakan orang tua mengajarkan ketidakjujuran di depan anak?

Apa pun sekarang bisa dikapitalisasi, termasuk dunia pendidikan, sebagai gaya hidup. Itu menarik karena orang akan melirik di sekolah yang favorit, punya nilai jual, dan nilai sosial tinggi. Tingkat kelulusan di perguruan tinggi, parameternya *cum laude* atau tidak *cum laude*. Padahal, itu hanya status dan tidak seharusnya begitu. Pendidikan S-2 untuk meraih *cum laude* semua harus AIPK 3,7 dan tesis harus A. Pada jenjang S-1 sulit, padahal di tataran tesis adalah permakluman dibanding S-1. Di sisi lain orang tua merasa bangga ketika sang anak *cum laude*. Padahal, itu bukan semata-mata nilai jual anak, bukan menggambarkan kepintaran anak. Untuk memperoleh pekerjaan tidak semata-mata dilihat dari sisi itu. Generasi sekarang bisa melakukan banyak hal yang membuat mereka

memperoleh pemasukan. Jadi memang gaya hidup bapak dan ibu yang harus dibenahi.

Pendidikan seperti digolongkan dalam terminologi kaya dan miskin. Apakah implementasi pendidikan dalam PPDB berkonsep SKTM ini salah kaprah?

Gaya hidup orang tua sekarang yang membuat opisi biner (binary opposition) yang kaya dan miskin, yang pintar dan tidak pintar. Padahal, setiap anak memiliki passion berbeda-beda. Generasi sekarang unik; lewat telepon seluler bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Nah, karena itu yang harus direvisi adalah skema SKTM. Kalau itu disamakan dengan konsep di perguruan tinggi dengan Bidikmisi (bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu secara ekonomi - red), kira-kira skema yang harus dibuat tidak akurat. Misalnya, orang dikatakan miskin hanya dilihat dari berapa jumlah tagihan membayar telepon, berapa pulsa yang dibeli, biaya listrik, dan sebagainya. Itu terlalu simpel. SKTM kan bertujuan agar orang tidak mampu secara ekonomi mendapat fasilitas pemerintah agar pendidikan tetap berlangsung. Itu menjadi salah kaprah karena campur tangan orang tua yang menggolongkan ini sekolah favorit dan ini bukan favorit. Itu racun yang harus dikikis sejak awal oleh keluarga dan orang tua.

Bagaimana Anda melihat Permen-dikbud No 14/2018 yang mengatur soal SKTM?

Ya, syarat SKTM diatur dalam peraturan menteri yang menyatakan setiap satuan pendidikan wajib menerima dan membebaskan biaya siswa tidak mampu paling sedikit 20 persen dibuktikan dengan SKTM. Regulasi itu hanya mengatur batas bawah, tetapi tidak mengatur batas atas. Regulasi yang mengambang seperti itu berpotensi menimbulkan ketidakakuratan SKTM. Regulasi yang lemah itu ditambah dengan keterbatasan

pihak yang menerbitkan untuk verifikasi data. Jadi, ya wislah, saya beri SKTM. Itu yang membuat salah kaprah.

Setelah proses verifikasi oleh sekolah, ada orang tua pemegang SKTM ternyata memiliki rumah dan fasilitas mewah. Bagaimana menurut Anda atas fakta tersebut?

Itu masalah kita. Ada aturan yang memungkinkan pendidikan dikapitalisasi. Sebetulnya kita ingin memfasilitasi warga miskin yang cerdas untuk tetap bersekolah. Itu diberi fasilitas oleh pemerintah. Namun muncul godaan sekolah favorit. Ada etika orang tua yang tergoda selalu menjadi nomor satu, selalu ingin (anak) bersekolah favorit, bangga dengan ini dan itu, padahal itu kebanggaan semu. Nah, kebanggaan semu itulah yang seharusnya dikikis dengan hal-hal yang sederhana.

Fenomena mendadak miskin sekarang tidak hanya pada SKTM, tetapi juga pada subsidi barang oleh pemerintah. Mengapa mereka rela dikatakan miskin untuk mendapatkan barang murah?

Saya menyebut itu miskin secara kultural dan struktural. Karena orang itu selalu merasa kurang, kurang, dan kurang. Ada anggapan di masyarakat seperti ini, saya mengajar, yang lain tidak, ada pandangan, wah dosen itu memperoleh insentif macam-macam. Dulu, dalam istilah Jawa, dikatakan walah wong cuma dosen saja sama saja dengan bala dhupak, orang miskin. Kalau sekarang itu nggak cocok. Konsep itu berubah, karena dia secara sadar memiskinkan diri dan mendapatkan fasilitas. Nah, itu kemiskinan struktural. Untuk keluar dari struktur itu setengah mati. Ketika orang merasa miskin, dia hanya berpura-pura miskin dan keinginan lebih besar adalah memperoleh sesuatu dari dikatakan miskin itu. Dia dalam setiap hal ingin mendapatkan keuntungan dari kemiskinan itu. Namun pada situasi yang sama ingin dianggap kaya. Itu hedonis. Ia ingin senantiasa

memperoleh kemudahan harta secara tidak sewajarnya, bahkan rela dimiskinkan.

Lalu apa yang dimaksud orang kaya?

Orang kaya itu yang legawa dengan keadaan. Kalau kita legawa apa yang ada pada diri kita itu sewajarnya, tetapi kalau yang apa yang diberikan saja masih merasa kurang dan kurang, itu hedonisme yang memandang kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan hidup, sampai-sampai rela memiskinkan diri. Maka, perlu mensyukuri, tidak merasa kurang. Kita di sini seperti ini, alhamdulillah, di sana masih banyak yang belum (mampu).

Apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan fenomena orang-orang yang mengaku miskin untuk memperoleh fasilitas lebih, dan hak-hak masyarakat miskin benar-benar sesuai dengan target?

Kalau dipahami secara keseluruhan, aturannya sudah ada, rambu harus diterapkan. Namun kesadaran pemberi verifikasi dan pemohon verifikasi purapura nggak tahu. Artinya, sikap itu harus ditepis dulu. Kita harus menyadari hidup itu ada aturannya. Kita tidak bisa menempatkan diri kita sebagai yang paling benar. Hidup kan sebenarnya seperti itu. (44)

Hedi Pudjo Santosa

Lahir:

- Magelang, 10 Mei 1961

Pendidikan:

- S-1 Ilmu Komunikasi UGM (1987)
- S-2 Sosiologi UGM (2001)
- S-3 Sosiologi UGM (2005)

Jabatan:

- Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP Undip). (44)

Tonton video wawancaranya di <http://www.suaramerdeka.com/smtv> atau scan QR Code

